



SUMBER BERITA

	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
X	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF
 NETRAL
 BAHAN PEMERIKSAAN
 PERHATIAN KHUSUS

Kasus Lahan Pemkot Tunggu Hasil KN

BENGKULU, BE - Kasus dugaan korupsi penyimpanan lahan aset milik Pemerintah Kota (Pemkot) Bengkulu, masih dalam tahap penyelidikan Kejari Bengkulu. Saat ini tim penyidik hanya tinggal menunggu hasil perhitungan kerugian negara dari BPKP Perwakilan Bengkulu.

Dikatakan Kajari Bengkulu, Emilwan Ridwan SH MH, sebelum perhitungan kerugian negara dilakukan

BPKP memberikan beberapa rekomendasi agar di penuhi Kejari Bengkulu. Beberapa rekomendasi yang sudah dipenuhi diantaranya memintai keterangan saksi dari BPKAD Kota Bengkulu dan keterangan saksi dari bidang pertanahan serta penilaian ulang lahan yang dilakukan tim jasa penilai publik.

"Hasil penilaian ulang aset yang dilakukan tim jasa penilai publik semoga bisa secepatnya keluar. Jika su-

dah selesai seluruhnya, kita serahkan ke BPKP agar perhitungan segera dilakukan," jelas Kajari.

Saat melakukan penilaian ulang beberapa waktu lalu, tim Appraisal fokus melakukan penilaian terhadap lahan seluas 8,6 hektar yang diduga dijual oleh oknum masyarakat tidak bertanggung jawab, tetapi tidak menutup kemungkinan kedepannya dilakukan penilaian pada titik lain jika memang dibu-

tuhkan untuk

"Yang jelas kita tetap bekerja keras melengkapi berkas perkara perhitungan kerugian negara agar cepat dilakukan perhitungan kerugian negara," imbuh Kajari. keperluan penyidikan.

Beberapa fakta kasus penyimpanan lahan pemkot diantaranya, lahan seluas 62 hektar lebih dibebaskan oleh tim 9 tahun 1995 lalu. Saat itu lahan tersebut dibeli menggunakan APBD Pemkot Bengkulu tahun 1995 Rp 150 juta. Tujuan lahan dibebaskan untuk dibangun perumahan ASN Pemkot

Bengkulu. Luas lahan yang dibangun perumahan ASN sekitar 12 hektar, dengan jumlah rumah yang dibangun mencapai 610 unit. Tetapi beberapa rumah tidak ditempati karena rusak akibat gempa bumi, hanya 569 rumah yang ditempati. Kemudian tahun 2015, oknum masyarakat tidak bertanggung jawab menjual lahan seluas 8,6 hektar kepada pengembang perumahan. Diduga lahan tersebut dijual mulai dari Rp 150 juta sampai Rp 500 juta. Saat ini lahan seluas 8,6 hektar sudah berdiri perumahan. (167)